

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Akuntansi tidak lepas dengan adanya laporan keuangan, dimana informasi dalam laporan keuangan tersebut diperlukan untuk tujuan akuntabilitas dan dapat membantu penggunaannya dalam mengambil sebuah keputusan khususnya pada sektor publik. Dengan harapan agar pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah juga dituntut untuk menyelenggarakan aparatur pemerintahan yang efisien dan produktif yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta mendorong pemerataan dengan mengembangkan seluruh potensi daerah (Siswanto & Maylani, 2022).

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 8 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

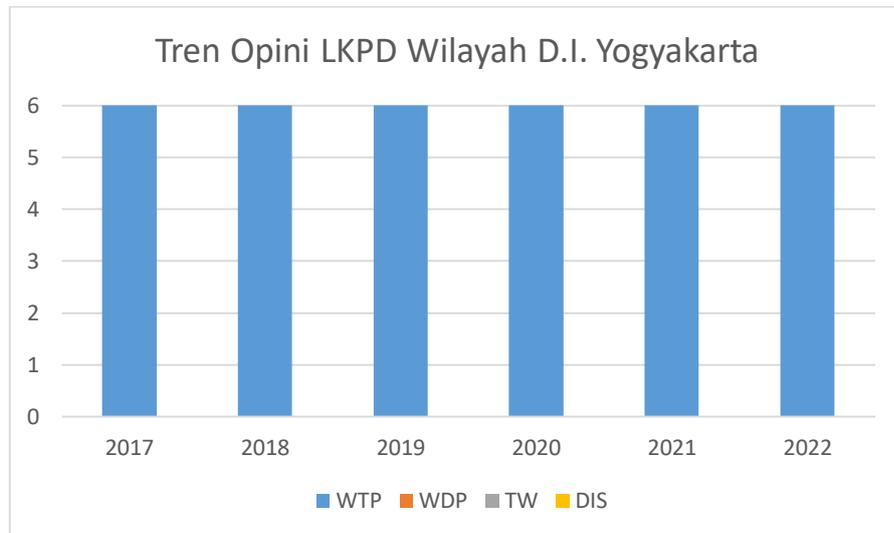
Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (bersaksi atau jujur tentang kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"

Laporan keuangan yang diperoleh akan digunakan oleh sejumlah pihak yang berkemungkinan, sehingga informasi yang terkandung di dalamnya harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. Berbagai

pengguna, termasuk investor, pembayar pajak, pengguna jasa, kreditor, karyawan, pemasok, dewan legislatif, dan badan pengawas, dapat menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan Pemerintahan (Novia et al., 2015). Pengguna laporan keuangan dikelompokkan menjadi tiga kelompok sesuai dengan tingkat keahlian akuntansi mereka. Pertama pengguna awam tanpa keahlian akuntansi, kelompok ini sebagai politisi, manajer sektor publik, warga negara, dan karyawan. Kedua, pengguna profesional dengan keahlian akuntansi yang baik, seperti badan pengawas dan auditor. Dan yang ketiga yaitu kelompok campuran dari kelompok pertama dan kedua, anggota eksekutif atau manajer dengan keahlian akuntansi tergabung dalam kelompok ini (van Helden & Reichard, 2019).

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dimanfaatkan DPRD dalam melaksanakan fungsinya baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan. Laporan hasil pemeriksaan diharapkan untuk pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, juga pembahasan dan penetapan perubahan APBD

DIY kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang mana menjadi yang ke 14 kalinya diraih oleh DIY secara berturut turut.



**Gambar 1. 1**  
**Tren Opini LKPD**

Sumber: [yogyakarta.bpk.go.id](http://yogyakarta.bpk.go.id)

BPK menegaskan, opini tersebut bukan merupakan jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah terbebas dari tindak kekurangan lainnya. BPK menyebutkan masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah salah satunya seperti pelaksanaan belanja modal pada beberapa kontrak yang tidak sesuai ketentuan. Kejaksaan negeri Bantul juga menemukan dugaan terkait tindak korupsi di bagian sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bantul. Kasus tersebut merupakan pembuatan nota fiktif dalam pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan stadion sultan agung pada tahun 2020-2021.

Dalam Raperda DIY tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD DIY TA 2022, realisasi anggaran pendapatan sebesar 100,77% dan belanja daerah sebesar 92,69%. Penerimaan pembiayaan terealisasi sebesar 98,26%

dari yang dianggarkan, pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar 100% dari yang dianggarkan, dan pembiayaan neto terealisasi sebesar 97,49% dari yang dianggarkan. Pendapatan transfer teralisasi 99% dari yang dianggarkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar 13,69% dari yang dianggarkan. Total belanja secara keseluruhan terealisasi sebesar 92,69% dengan rincian: belanja operasi teralisasi 91,68%, belanja modal terealisasi sebesar 94,90%, belanja tidak terduga terealisasi sebesar 9,19%, belanja transfer terealisasi sebesar 98,28%.

Dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DIY tahun anggaran 2023 dijelaskan secara rinci bahwa dalam proyeksi perkembangan indikator ekonomi makro DIY tahun 2023 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,34%, tingkat pengangguran terbuka 3,42, indeks gini 0,423, indeks williamson sebesar 0,444, indeks pembangunan manusia 81,07, tingkat kemiskinan 10,74%, dan indeks pembangunan kebudayaan 74,58. Struktur rancangan APBD tahun anggaran 2023 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp5.713.893.724.612,00, Belanja Daerah sebesar Rp5.962.893.724.612, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp249.000.000.000,00. RAPBD tersebut dibuat dengan laporan keuangan pemerintah daerah yang beropini WTP sebagai landasannya (jogjaprov.go.id, 2023).

DPRD memiliki fungsi salah satunya yaitu membentuk peraturan daerah. Sebagai perwakilan atau wakil rakyat DPRD mempunyai kewenangan

yang cukup besar untuk mempengaruhi dan memutuskan kebijakan daerah, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat.

DPRD dan pemda DIY menyepakati 5 perda di tahun 2023 pada Raperda salah satunya tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, materi pengaturan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Raperda ini menjadi pedoman teknis pemerintah dalam mengelola keuangan daerah karena pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan tidak bisa lepas dari pengelolaan keuangan daerah (dprd, 2023).

DPRD sebagai salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah membutuhkan informasi dalam laporan keuangan yang selanjutnya dapat digunakan untuk penelaahan dan pengambilan keputusan sesuai dengan mandat dan fungsi serta kewenangan DPRD itu sendiri (Novia et al., 2015).

Berdasarkan fenomena tersebut dapat diketahui bahwa DPRD yogyakarta menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan, namun dalam beberapa studi ada ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan kebutuhan penggunaannya. Karakteristik informasi itu sendiri yang menjadi akar penyebab dari informasi yang berlebihan atau information overload, hal tersebut menyebabkan tidak digunakannya laporan keuangan dalam pengambilan keputusan (Wan Zahari Wan Yusoff and Maziah Ismail, 2008). Kurangnya pengetahuan umum dan kompleksitas informasi akuntansi membuat informasi akuntansi jarang

digunakan terutama oleh politisi (Jorge et al., 2019). Penelitian Jethon & Reichard (2022) juga menyatakan bahwa penggunaan informasi kinerja oleh politisi dianggap rendah dan penggunaan data yang terbatas, anggota dewan juga menganggap informasi kinerja dalam anggaran tidak terlalu relevan karena hanya berfokus pada hasil dan tidak membantu mereka dalam kesepakatan politik, selain itu anggota dewan enggan membaca anggaran yang dibebani dengan data yang tidak relevan bagi mereka. Tidak sejalan dengan penelitian Jethon & Reichard, penelitian Novia dan lain lain (2015) yang menyatakan bahwa informasi lebih dibutuhkan oleh DPRD. Sejalan dengan penelitian Wan Zahari Wan Yusoff dan Maziah Ismail, penelitian Jorge dan lain lain (2019) menunjukkan bahwa anggota parlemen atau politisi menggunakan informasi anggaran atau keuangan, atau informasi lain yang tersedia sesuai keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, dan penerapan teknologi informasi (Purba & Purba, 2023). Penyajian laporan keuangan juga mempengaruhi akuntabilitas pemerintah salah satunya yaitu DPRD (Paramayana et al., 2022). Akuntabilitas kinerja untuk semua pemerintah sangat penting, karena akuntabilitas kinerja adalah perwujudan perencanaan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pemerintah, dan pembangunan sosial (Marlena & Subaeti, 2018).

Penggunaan laporan keuangan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dibutuhkan laporan keuangan yang berkualitas. Dimensi untuk

mengukur kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan (Rohmah et al., 2020). Menurut PSAK laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang mana informasi tersebut memungkinkan pengguna informasi untuk mengandalkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan (Indrasari et al., 2017).

Salah satu komponen organisasi yang membantu pengendalian pencatatan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Data keuangan daerah yang akurat akan digunakan untuk mengambil keputusan, Sistem akuntansi keuangan daerah harus digunakan untuk menciptakan hasil yang andal dan akurat (Pujanira & Taman, 2017). Penelitian Yangsi (2020) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Yang mana hal tersebut guna kepentingan pengambilan keputusan.

Tampilan *interface* seperti format yang digunakan dalam laporan keuangan dan gaya desain yang beragam yang ada di dalam laporan keuangan dapat memudahkan penggunanya dalam memperoleh informasi. Informasi yang di dapat dari laporan keuangan tersebut digunakan oleh penggunanya untuk pengambilan keputusan. Penelitian Kelton dan Pennington (2012) menunjukkan bahwa format dan konten penyajian informasi dalam laporan keuangan mempengaruhi pengambilan keputusan investor, termasuk pada

keputusan investasi, keputusan pembelian, dan pengambilan keputusan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan penggunaan laporan keuangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mengingat penelitian mengenai interface laporan keuangan masih sedikit maka peneliti menambah interface sebagai variabel yang digunakan, dan kualitas laporan keuangan sebagai variabel pemediasi. Laporan keuangan yang berkualitas akan memudahkan penggunaannya dalam menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

Penelitian ini akan difokuskan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta, yang mana merupakan salah satu pengguna laporan keuangan pemerintah. Dengan merujuk penjelasan yang telah diberikan, Penelitian ini diberi judul **“PENGARUH *INTERFACE* DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP PENGGUNAAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL PEMEDIASI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah interface berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan?

2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan?
3. Apakah interface berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
4. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan?
5. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan?
6. Apakah interface berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan?
7. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan?

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris hal hal berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh interface terhadap penggunaan laporan keuangan
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penggunaan laporan keuangan
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh interface terhadap kualitas laporan keuangan

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penggunaan laporan keuangan
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh interface terhadap penggunaan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap penggunaan laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai kalangan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan atau pengetahuan mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah dan interface terhadap penggunaan laporan keuangan oleh politisi seperti DPRD dalam mengambil sebuah keputusan dan diharapkan dapat memberi referensi untuk berbagai kalangan, terutama untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penggunaan laporan keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai penggunaan laporan keuangan oleh DPRD. Dan bagi masyarakat atau pihak lain diharapkan penelitian ini dapat dapat memberi wawasan mengenai bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.